

## **KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA**

**Aziz Alfarizi, Friz Zwiki**

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Email: Azizalfarizi43@gmail.com, Frizzwiki76@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek hukum, menegakkan prinsip-prinsip keadilan Pemilu untuk mewujudkan yang demokratis (jujur dan adil) maupun menjadi rujukan bagi edukasi maupun riset dalam pemantapan kehidupan hukum dan demokrasi di tanah air. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif yang digambarkan melalui laporan verbal untuk menjelaskan dan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan sumber data sekunder yang merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya. Hasil Penelitian ini adalah keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas proses demokratis. Ketidakadilan dalam pemilihan, seperti adanya praktek kecurangan, distribusi sumber daya tidak merata, atau ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu, dapat merusak integritas pemilihan dan mengurangi representativitas hasil pemilihan. Ketika pemilih merasakan adanya ketidakadilan, mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan meragukan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan tersebut. Untuk mengatasi tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia, perlu adanya komitmen yang sangat kuat untuk memperkuat integritas dan representativitas proses demokratis.

**Kata Kunci:** Keadilan; Hukum; Pemilu Serentak.

### **Abstract**

*The purpose of this study is to gain a deeper understanding of legal aspects, uphold the principles of electoral justice to realize a democratic (honest and fair) as well as a reference for education and research in strengthening legal and democratic life in the country. The research method applied in this article is a qualitative approach described through verbal reports to explain and describe the information that has been collected. Data sources in this study are divided into two types, namely primary data sources obtained directly from the field, and secondary data sources which are pre-existing information. The result of this study is that fairness in simultaneous elections in Indonesia has a significant impact on the integrity of the democratic process. Unfairness in elections, such as fraudulent practices, uneven distribution of resources, or impartiality in the administration of elections, can undermine the integrity of elections and reduce the representation of election results. When voters sense injustice, they may lose faith in the democratic system and doubt the legitimacy of the government that results from the election. To overcome the challenges of fairness in simultaneous elections in Indonesia, there needs to be a very strong commitment to strengthen the integrity and representativeness of the democratic process*

**Keywords:** Justice; Law; Concurrent Elections

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang dan Pancasila. Negara hukum merupakan sistem yang mengacu pada kekuasaan Negara yang dimana kekuasaan Negara tersebut harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil (Wibowo, 2023).

Pemilu serentak di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi negara ini. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berhasil melaksanakan beberapa pemilu serentak yang melibatkan pemilihan presiden, anggota parlemen, dan tingkat pemerintahan daerah. Pemilu serentak ini melibatkan jutaan pemilih dan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, calon, dan masyarakat secara luas (Dewi, 2020).

Meskipun demikian, pemilu serentak juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Indonesia memiliki keberagaman geografis, sosial, dan politik yang kompleks. Tantangan ini mencakup keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, tantangan logistik dalam mendistribusikan surat suara, dan masalah keamanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilu (Kadek, 2019).

Menurut Jalaludin, peranan peraturan perundang-undangan adalah untuk menata dan mengatur kehidupan, mendiseminasikan kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan, serta menindak dan memberantas tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) (Wiratama, 2022). Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu "Dimana ada manusia pasti ada kejahatan"; "Crime is eternal-as eternal as society." Penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum menjadi masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian yang serius. dari lingkungan penegak. hukum itu sendiri dan masyarakat.

Sebagai Lembaga yang bertugas untuk menegakkan keadilan kepada masyarakat. Namun, kenyataannya justru masyarakat hilang kepercayaannya terhadap penegak hukum dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga menjelekkan nama dari aparat penegak hukum itu sendiri (Zainuddin, 2023).

Pentingnya untuk menjaga keadilan dalam pemilu serentak. Keadilan memastikan bahwa semua pemilih memiliki akses yang adil untuk memilih sesuai dengan keyakinan politik mereka. Perlakuan yang setara terhadap partai politik dan calon juga menjadi aspek penting untuk menjaga integritas pemilu. Pemilu yang adil harus mampu menghindari praktik-praktik kecurangan seperti money politics, politik identitas, dan pelanggaran hukum lainnya (Haris, 2021).

Pemilu serentak juga harus memastikan kepastian dalam proses pemilihan. Kepastian ini melibatkan kejelasan dalam peraturan dan prosedur pemilu, transparansi dalam pemrosesan dan penghitungan suara, serta keabsahan hasil pemilu yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Tanpa kepastian ini, demokrasi menjadi rentan terhadap ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan konflik politik (Frenki, 2016).

Oleh sebab itu, penting untuk menghadapi tantangan ini dengan mencari harmoni antara keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia (Faiza, 2019). Harmoni ini dapat dicapai melalui upaya yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, calon, dan masyarakat. Langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, dan penggunaan teknologi yang aman dan terpercaya dapat membantu menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian.

Dalam konteks perubahan sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang, penting untuk terus mengkaji dan memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Evaluasi terus-menerus dan perbaikan yang dilakukan dapat membantu mengatasi tantangan yang muncul dan memperkuat integritas pemilu. Dengan menjaga keadilan dan kepastian, pemilu serentak di Indonesia dapat menjadi sarana yang mendorong partisipasi politik yang luas, memperkuat demokrasi, dan membangun masyarakat yang adil dan demokratis (Haris, 2019).

Kebaharuan dari naskah yang ditulis terletak pada pendekatan yang menggabungkan dua aspek krusial dalam pemilu serentak di Indonesia, yaitu keadilan dan kepastian. Dalam banyak diskusi mengenai pemilu, sering kali aspek keadilan dan kepastian dipisahkan menjadi dua isu yang berbeda. Namun, naskah ini menghadirkan gagasan bahwa kedua aspek ini saling terkait dan harus dijaga dalam harmoni untuk menjaga integritas pemilu (Fajlurrahman, 2018).

Selain itu, naskah ini juga mencerminkan situasi aktual di Indonesia, dengan fokus pada pemilu serentak. Pemilu serentak telah menjadi tren yang semakin populer di berbagai negara, dan di Indonesia, pemilu serentak telah menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi setelah reformasi.

Dalam konteks ini, naskah ini memberikan sorotan pada tantangan dan dinamika khusus yang dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan pemilu serentak, yang melibatkan pemilihan presiden, anggota parlemen, dan tingkat pemerintahan daerah secara bersamaan. Melalui pendekatan ini, naskah ini menawarkan sudut pandang yang komprehensif dan relevan dalam menghadapi tantangan pemilu serentak, sekaligus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan dan kepastian (Lawrence, 2014).

Pengaruh teknologi dalam pemilu dan tantangan terkait privasi dan keamanan data juga mencerminkan perkembangan terbaru dalam konteks pemilihan umum. Dengan menggabungkan konsep keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia, serta mempertimbangkan isu-isu aktual yang muncul, naskah ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan diskusi mengenai demokrasi, pemilu, dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam menjaga integritas pemilihan umum. Konteks pemilu serentak di Indonesia, beberapa permasalahan yang umumnya

muncul dalam penelitian tentang pemilu serentak dapat mencakup koordinasi dan logistik: Pemilu serentak melibatkan berbagai jenis pemilihan secara bersamaan, yang dapat menimbulkan tantangan logistik dan koordinasi yang kompleks.

Permasalahan ini dapat mencakup distribusi surat suara, pemilihan tempat pemungutan suara yang tepat, dan penempatan petugas pemilu. Keadilan dan perlakuan yang setara: Penting untuk memastikan bahwa semua partai politik dan calon mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam pemilu serentak. Tantangan dalam memastikan keadilan meliputi penanganan keluhan dan sengketa pemilu, serta mencegah praktik-praktik kecurangan. Pengaruh teknologi: Penggunaan teknologi dalam pemilu serentak dapat memberikan manfaat seperti efisiensi dalam pemrosesan suara, namun juga dapat menimbulkan tantangan seperti masalah privasi dan keamanan data, serta ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam mengakses teknologi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggambarkan jenis penelitian lapangan (field research) yang menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan ini berfokus pada penyelidikan langsung terhadap masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha menciptakan gambaran yang komprehensif dengan mengeksplorasi kata-kata, mendokumentasikan laporan terperinci dari perspektif responden, dan menyelidiki situasi yang dialami.

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif yang digambarkan melalui laporan verbal untuk menjelaskan dan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan sumber data sekunder yang merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya (Sugiyono, 2017). Analisis Literatur: Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan analisis literatur yang komprehensif mengenai pemilu serentak, tantangan keadilan dan kepastian dalam konteks pemilu serentak, serta pengaruh teknologi dalam pemilihan umum.

Analisis literatur ini akan melibatkan pencarian dan peninjauan terhadap buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan. Studi Kasus: Untuk memahami secara lebih mendalam tantangan dan harmoni antara keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia, dilakukan studi kasus yang melibatkan pemilihan umum terkini di Indonesia. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti penyelenggara pemilu, lembaga pemantau, partai politik, dan pemilih. Selain itu, data sekunder seperti laporan pemilihan umum, data statistik, dan dokumen-dokumen resmi akan digunakan untuk mendukung analisis.

Analisis Kuantitatif dan Kualitatif: Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif melibatkan penggunaan statistik untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data numerik, seperti persentase partisipasi pemilih, tingkat keluhan pemilu, atau hasil penghitungan suara. Analisis kualitatif melibatkan pengorganisasian, pemeriksaan, dan interpretasi data kualitatif, seperti transkrip wawancara atau kutipan dari sumber-sumber utama.

Pendekatan ini akan membantu dalam memahami nuansa, persepsi, dan pengalaman yang lebih mendalam terkait keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak. Analisis Tematik: Data yang diperoleh akan diolah menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan pola-pola dan tema-tema penting yang muncul dalam penelitian. Hal ini akan membantu dalam merangkum dan menggambarkan tantangan serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap harmoni atau ketegangan antara keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia.

Validitas dan Keandalan: Upaya akan dilakukan untuk memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian. Ini akan mencakup penggunaan triangulasi, yaitu membandingkan dan mencocokkan temuan dari berbagai sumber dan metode untuk memverifikasi hasil penelitian. Selain itu, pemikiran kritis dan refleksi peneliti akan terus menerus diterapkan untuk meminimalkan bias dan memastikan interpretasi yang akurat.

Rekomendasi: Berdasarkan temuan penelitian, akan disusun rekomendasi kebijakan atau langkah-langkah perbaikan yang dapat meningkatkan keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia. Rekomendasi ini dapat meliputi perbaikan sistem pemilu, peningkatan transparansi, perbaikan regulasi teknologi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Keadilan Dalam Pemil Serentak di Indonesia Memengaruhi Integritas dan Representativitas Proses Demokratis**

Tantangan-tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan representativitas proses demokratis. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks ini termasuk praktik kecurangan pemilu, ketidaknetralan penyelenggaraan pemilihan, serta distribusi sumber daya yang tidak merata. Praktik kecurangan pemilu, seperti money politics, politik identitas, dan penggunaan kekuasaan yang tidak adil, dapat mengancam integritas pemilihan (Anjasuma, 2013).

Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam perolehan suara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Selain itu, ketidaknetralan penyelenggaraan pemilihan, baik dalam bentuk kebijakan yang memihak atau manipulasi proses, dapat merusak integritas dan kredibilitas pemilu, sehingga mengurangi representativitas hasil pemilihan (Sabrina, 2021).

Dampak dari tantangan-tantangan keadilan ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan sebagai mekanisme yang adil untuk menentukan wakil rakyat. Ketidakpuasan terhadap integritas pemilu dapat mengarah pada ketidakpartisipasian aktif dalam proses demokratis, termasuk penurunan partisipasi pemilih dan meningkatnya tingkat golput. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap pemilihan juga dapat merusak ikatan sosial dan persatuan dalam masyarakat, mengancam stabilitas politik dan harmoni sosial.

Untuk memastikan integritas dan representativitas proses demokratis, perlu dihadapi tantangan-tantangan keadilan tersebut. Langkah-langkah penting yang dapat diambil meliputi penerapan aturan yang ketat, pengawasan yang independen dan

transparan, sertapenegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam pemilihan juga tidak dapat diabaikan (Ramlan, 2014).

Dengan mengatasi tantangan-tantangan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia, integritas dan representativitas proses demokratis dapat ditingkatkan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan sebagai instrumen yang adil untuk menentukan perwakilan politik, menjaga stabilitas politik, dan mempromosikan kehidupan demokratis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

### **Kepastian dalam Pemilu Serentak di Indonesia Dapat Dipertahankan Untuk memastikan Keadilan dalam Perolehan Suara Penghitungan Hasil pemilihan**

Dalam konteks pemilu serentak di Indonesia, mempertahankan kepastian sangat penting untuk memastikan keadilan dalam perolehan suara dan penghitungan hasil pemilihan. Kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi proses pemilu sangat bergantung pada upaya untuk menjaga kepastian ini. Salah satu langkah kunci untuk mempertahankan kepastian adalah dengan mengimplementasikan aturan yang jelas dan tegas terkait pemilu. Penyusunan dan penerapan undang-undang pemilu yang komprehensif dan transparan dapat memberikan kerangka kerja yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan.

Hal ini meliputi aturan yang mengatur proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa pemilihan. Selain itu, penting untuk melibatkan lembaga pengawas independen dalam pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memastikan pemenuhan aturan dan integritas pemilu.

Keberadaan lembaga-lembaga ini dapat memantau dan mengawasi jalannya pemilihan, mengatasipelanggaran, dan menyelesaikan sengketa dengan adil dan transparan (Triono, 2018). Penggunaan teknologi juga dapat membantu mempertahankan kepastian dalam pemilu serentak. Penggunaan sistem pemilu elektronik atau teknologi lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penghitungan suara serta meminimalkan risiko manipulasi hasil pemilihan.

Namun, penggunaan teknologi juga harus diiringi dengan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga privasi dan keamanan data pemilih. Dengan menjaga kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia, keadilan dalam perolehan suara dan penghitungan hasil pemilihan dapat terjamin. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokratis.

### **Pemenuhan Keadilan dalam Pemilu Serentak di Indonesia dapat memengaruhi Partisipasi Pemilih dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Proses Demokratis**

Pemenuhan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Ketika keadilan terjaga, partisipasi pemilih cenderung meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan juga meningkat. Salah satu faktor

penting yang memengaruhi partisipasi pemilih adalah keyakinan bahwa pemilihan akan dilakukan secara adil dan setiap suara memiliki nilai yang sama. Jika pemilih percaya bahwa pemilu akan memastikan perolehan suara yang adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara mereka.

Sebaliknya, jika terdapat ketidakadilan atau praktik kecurangan yang meragukan, hal itu dapat menurunkan motivasi pemilih untuk berpartisipasi karena mereka merasabahaya suara mereka tidak akan diperhitungkan dengan adil. Selain partisipasi pemilih, pemenuhan keadilan juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis secara keseluruhan. Jika pemilu dianggap adil dan transparan, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan sistem politik secara umum (Simorangkir, 1983).

Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan membangun legitimasi pemerintahan yang terpilih. Namun, jika terdapat ketidakpuasan terhadap pemenuhan keadilan dalam pemilu, partisipasi pemilih dapat menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis dapat terkikis. Pelanggaran etika dalam pemilihan, ketidaknetralan penyelenggaraan, dan keraguan terhadap integritas pemilihan dapat menghasilkan rasa skeptisisme dan ketidakpercayaan yang berdampak negatif pada partisipasi dan legitimasi proses demokratis.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan pemenuhan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia. Hal ini melibatkan penerapanaturan yang adil dan transparan, pengawasan yang independen, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam pemilihan. Dengan demikian, partisipasi pemilih dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis dapat dipertahankan, menjaga kestabilan politik dan kelangsungan demokrasi di Indonesia (Diyar, 2018).

## **Kesimpulan**

Keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan representativitas proses demokratis. Ketidakadilan dalam pemilihan, seperti adanya praktek kecurangan, distribusi sumber daya yang tidak merata, atau ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu, dapat merusak integritas pemilihan dan mengurangi representativitas hasil pemilihan. Ketika pemilih merasakan adanya ketidakadilan, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan meragukan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan tersebut.

Untuk memastikan keadilan dalam perolehan suara dan penghitungan hasil pemilihan, kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia harus dipertahankan. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pengawasan pemilihan, pemantauan penghitungan suara, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

Dengan menjaga kepastian dalam pemilihan, termasuk perlindungan terhadap integritas sistem pemilihan, dapat dipastikan bahwa suara setiap pemilih

dihargai dan hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat dengan adil. Pemenuhan keadilan dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Jika pemilih merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihormati atau adanya ketidakadilan dalam pemilihan, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan pemenuhan keadilan yang tinggi dalam pemilu serentak, termasuk perlakuan yang sama bagi setiap pemilih, kebebasan untuk menyuarakan pilihan politik, dan jaminan bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar.

### BIBLIOGRAFI

- Aldi Wiratama, Ajie Haikal, Zainudin Hasan. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 17 (2022): 206–12.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.
- Dewi, N. T. R. "Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 1 (2020): 13–28.
- Faiza, Lailatul. "Strategi Komunikasi Politik Pks Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru." *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 2, no. 2 (2019): 140–51.
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Frenki. "Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8(1) (2016): 54–65.
- Haris Zulkarnain, Muhammad, and Ahmad Saufi. "Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (2021): 154–73. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.262>.
- Hasan, Zainudin, Aqshal Azan, Putra Salim, and Salsabila Brillianti Sarenc. "Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme Dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 03, no. 03 (2023): 828–31.
- JCT Simorangkir. *Hukum Dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Manurung, Harris. "PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP RETURN SAHAM DI INDONESIA (Studi Kasus Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia)." *Journal for Business and Entrepreneur* 3, no. 1 (2019): 12–28.
- Muhammad Saad, Dian Fitri Sabrina,. "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 15–37.
- Ramlan Surbakti. *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, Dan Penyalahgunaan Uang Pada Pemilu*. Jakarta: Kemitraan, 2014.
- Siyasah, D A N Fiqih, and Rhandi Anjasuma. "PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 PENDAHULUAN Sejak Pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia Terbentuk , Para Pendiri Negara Memilih ' Demokrasi ' Sebagai Sistem Politik Idealnya," 2023, 99–116.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good

- Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 615–28.
- Triono, T. “STRATEGI POLITICAL MARKETING PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI PROVINSI LAMPUNG.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol 14, No (2018): 88–108.
- W. Lawrence Neuman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Sevent Edition)*. Harlow: Pearson Harvard University Press, 2014.
- Wibowo, Ade Putra, Zainudin Hasan, Universitas Bandar Lampung, and A Pendahuluan. “PENTINGNYA PENEGAKAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN.” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 3 (2023): 82–90.

---

**Copyright holder:**

Aziz Alfarizi, Friz Zwiki (2024)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**

